

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN AKADEMI KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA

Monica Niken Wulandari¹, Eko Handoyo²

¹Akademi Kepolisian, ²Universitas Negeri Semarang

e-mail: ¹ monic@akpol.ac.id, ² eko.handoyo@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi di era globalisasi. Pengembangan mutu pendidikan menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional guna menciptakan masyarakat yang kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia dalam konteks peningkatan daya saing bangsa. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap kebijakan pemerintah, data empiris, serta hasil penelitian terdahulu terkait peningkatan mutu pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek pemerataan, kualitas guru, sarana-prasarana, dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja. Rekomendasi diarahkan pada penguatan tata kelola pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, integrasi teknologi, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada daya saing global.

Keywords: *kebijakan pendidikan, mutu pendidikan, daya saing bangsa, SDM unggul, kebijakan nasional.*

Article submission: 20 Okt 2025

Article revision: 25 Okt 2025

Article acceptance: 04 Nov 2025

I. INTRODUCTION

Pendidikan berperan strategis dalam membangun peradaban dan menentukan masa depan suatu bangsa. Negara dengan sistem pendidikan yang unggul cenderung memiliki tingkat produktivitas tinggi dan daya saing global yang kuat (Porter, 1990). Di Indonesia, pengembangan mutu pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menargetkan terciptanya sumber daya manusia unggul untuk menuju Indonesia Emas. Namun demikian, berdasarkan data Global Competitiveness Index (World Economic Forum, 2023), daya saing Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, terutama dalam aspek kualitas pendidikan dasar dan tinggi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kebijakan pendidikan yang berorientasi pada mutu, relevansi, dan keadilan dalam rangka meningkatkan daya saing Bangsa. Kebijakan pengembangan mutu pendidikan tidak hanya berbicara tentang peningkatan hasil belajar, tetapi juga mencakup sistemik: kurikulum, kompetensi guru, infrastruktur, tata kelola, serta penguatan budaya belajar. Oleh karena itu, paper ini membahas bagaimana kebijakan pengembangan mutu pendidikan dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di era global. Latar belakang perkembangan global, perubahan teknologi, dan meningkatnya kompleksitas kejahatan lintas negara membuat lembaga pendidikan kepolisian seperti Akpol harus terus bertransformasi agar tetap relevan dan kompetitif. Pendidikan kepolisian tidak lagi sekadar menekankan kemampuan teknis atau penegakan hukum saja, tetapi harus mempersiapkan perwira masa depan yang memiliki kapasitas intelektual global, keterampilan teknologi, kemampuan komunikasi internasional, serta fleksibilitas dalam menghadapi tantangan baru seperti kejahatan siber, terorisme, dan jaringan kriminal transnasional. Sejalan dengan visi Akpol—menjadi lembaga pendidikan tinggi Polri yang menghasilkan perwira profesional, cerdas, bermoral, modern, berwawasan global, dan berstandar internasional — maka sangat penting untuk meninjau kembali kurikulum, fasilitas, metode pembelajaran, dan program unggulan yang bisa menguatkan karakter ini.

Pengertian Mutu Pendidikan. Mutu pendidikan mencakup kemampuan sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja (Tilaar, 2002). Menurut Sallis (2015), mutu pendidikan diukur melalui input (sumber daya), proses (metode pembelajaran), dan output (hasil belajar).

Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat keputusan strategis yang dirancang untuk mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan sistem pendidikan suatu negara (Dye, 2013). Di Indonesia, kebijakan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diturunkan dalam berbagai peraturan turunan seperti Permendikbud dan Peraturan Pemerintah.

Daya saing bangsa adalah kemampuan suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas nasional (Porter, 1990). Pendidikan yang bermutu tinggi menjadi fondasi utama dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif, kreatif, dan inovatif (Schwab, 2019).

Teori yang Relevan Dalam konteks ini, teori Human Capital (Becker, 1993) menjadi dasar pemikiran utama. Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan individu yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa.

II. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode: Studi literatur (library research) dengan menganalisis berbagai sumber akademik, kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, serta hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui dokumen resmi seperti RPJMN 2020–2024, laporan OECD, UNESCO, dan World Bank yang relevan dengan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia. Pengumpulan Literatur Mengumpulkan artikel jurnal, laporan kebijakan, dokumen institusional Akpol/Polri, dan studi kasus internasional (misalnya model ILEA – International Law Enforcement Academy). Analisis Tema Menyusun tema utama seperti: kurikulum kompetensi, pembelajaran bilingual, fasilitas teknologi, dan evaluasi berkelanjutan. Sintesis dan Perumusan Rekomendasi Dari hasil analisis literatur, merumuskan kerangka kurikulum baru, program unggulan, dan tahapan implementasi di Akpol.

Triangulasi & Validasi Kebijakan Membandingkan temuan dengan praktik di institusi kepolisian lain (nasional/internasional) untuk memvalidasi kelayakan rekomendasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan peningkatan daya saing bangsa

III. RESULTS

Kebijakan Pengembangan Mutu Pendidikan di Indonesia. Beberapa kebijakan penting yang menjadi arah pengembangan mutu pendidikan di Indonesia antara lain:

1. Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka – menekankan pada fleksibilitas pembelajaran, pengembangan karakter, dan kompetensi abad 21.
2. Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak – bertujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidik agar menjadi agen perubahan dalam pembelajaran.
3. Digitalisasi Pendidikan – melalui platform seperti *Merdeka Mengajar*, *Rumah Belajar*, dan *Kampus Merdeka* untuk meningkatkan literasi digital dan akses pembelajaran.
4. Revitalisasi Pendidikan Vokasi – untuk menciptakan link and match antara pendidikan dan dunia kerja.
5. Internasionalisasi Pendidikan Tinggi – dengan mendorong publikasi ilmiah internasional, kolaborasi riset, dan pertukaran akademik.

Penerapan di akademi kepolisian dalam kaitan pengembangan mutu Pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa adalah: Konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi & Global : Literatur internasional menekankan penggunaan kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum) agar lulusan memiliki sejumlah kompetensi inti yang konsisten. jsire.org Misalnya, Comiskey et al. mengusulkan agar pendidikan kepolisian menyertakan domain pengetahuan, keterampilan, dan sikap (attitude) yang relevan dengan peran abad ke-21 seperti kepemimpinan, etika, forensik digital, cybercrime, dan adaptasi teknologi. jsire.org.

Penelitian “Incorporating Higher Education into Initial Police Training” juga menyoroti kemitraan antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi agar

pendidikan perwira menggabungkan kedalaman akademik dan relevansi praktik. tandfonline.com

Dalam konteks Akpol, kurikulum kompetensi harus mencakup:

1. Domain hukum & kriminologi internasional
2. Forensik digital & keamanan TI
3. Kepemimpinan global & komunikasi lintas budaya
4. Bahasa Inggris sebagai bahasa pengajaran sebagian
5. Metode pembelajaran aktif: studi kasus, simulasi, flipped classroom

Program Unggulan & Eksposur Internasional

Kelas Seminar Bilingual / Bahasa Inggris Ilmiah. Dengan menetapkan standar kemampuan minimal (misalnya IELTS 6.5 atau TOEFL iBT 80–90), kelas bilingual bisa dijadikan bagian evaluasi akademik. Seminar tahunan bilingual yang mengundang pembicara asing akan memaksa taruna untuk berpikir dan presentasi dalam bahasa Inggris. Pertukaran Taruna Internasional & Magang Kepolisian Mitra. Model seperti program pertukaran institusi akademik atau magang di kepolisian negara sahabat akan memberi pengalaman langsung. Sebagai contoh event yang belum lama ini dilaksanakan yaitu pertemuan Akademi kepolisian seluruh Asia Pacific di Semarang. Konferensi Internasional & Kompetisi Global Mengadakan konferensi atau lomba internasional (forensik digital, kasus lintas negara, anti-terorisme) di kampus Akpol sebagai agenda tahunan. Taruna diberi peluang menyajikan makalah, menjadi moderator, atau peserta panel. Taruna secara aktif mengikuti konferensi tingkat dunia dan pernah memenangkan juara 1 dalam lomba karya ilmiah.

Implementasi Fasilitas & Infrastruktur Digital

Distribusi Tablet / Laptop. Setiap taruna mendapat perangkat (tablet atau laptop) yang kompatibel dengan aplikasi e-learning, simulasi digital, dan modul pembelajaran. Dengan demikian, akses materi dan tugas tidak bergantung pada ruang kelas fisik. Jaringan WiFi & Intranet Instansi. Instalasi WiFi berkecepatan tinggi di semua ruang kelas, asrama, laboratorium, dan area publik wajib dilakukan. Intranet internal juga harus tersedia untuk menyimpan modul, referensi jurnal, dan sistem pengumpulan tugas digital. Laboratorium Forensik Digital, Ruang Simulasi & AR/VR. Laboratorium yang memfasilitasi analisis digital, pengolahan data besar (big

data), keamanan siber, serta ruang simulasi VR/AR untuk skenario kepolisian modern sangat mendesak. Perpustakaan Digital dan koleksi Ebook, serta database hukum global agar taruna dan pengajar dapat merujuk literatur mutakhir.

Tahapan & Strategi Implementasi

1. Audit & Gap Analysis

Identifikasi fasilitas, kompetensi dosen, dan kesiapan infrastruktur di Akpol saat ini.

2. Pelatihan Dosen / Instruktur

Pelatihan bahasa Inggris intensif, workshop pengajaran aktif, dan pelatihan penggunaan alat simulasi/VR serta teknologi digital.

3. Pilot Project

Uji coba kelas bilingual, penggunaan tablet, dan WiFi di satu angkatan atau fakultas terlebih dahulu. Observasi dan evaluasi hasilnya.

4. Ekspansi Bertahap

Setelah pilot sukses, expand ke seluruh angkatan dan mata kuliah dalam 3–5 tahun.

5. Monitoring & Evaluasi

Bentuk unit evaluasi internal yang memantau: skor kemampuan bahasa Inggris, penggunaan fasilitas, kepuasan taruna, jumlah publikasi internasional, prestasi luar negeri, dan outcome lainnya.

6. Kolaborasi Stakeholder

Libatkan Polri, Lemdiklat, donor teknologi, dan institusi luar negeri agar ada dukungan finansial, teknis, dan akademik.

Tantangan dalam Pengembangan Mutu Pendidikan

Meskipun kebijakan telah dirancang, implementasi masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

Kesenjangan mutu antar daerah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kualitas guru yang belum merata serta masih rendahnya kompetensi pedagogik dan digital. Infrastruktur pendidikan yang terbatas di daerah terpencil. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi yang cepat. Minimnya budaya riset dan inovasi di lingkungan pendidikan tinggi.

Implikasi terhadap Daya Saing Bangsa

Kualitas pendidikan yang rendah berdampak langsung pada indeks produktivitas nasional. Berdasarkan data *Human Development Report* (UNDP, 2023), kualitas SDM Indonesia masih berada pada kategori menengah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) 0,73. Untuk meningkatkan daya saing bangsa, pendidikan harus diarahkan pada penguatan kompetensi abad 21: berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kebijakan yang efektif akan menghasilkan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Refleksi dan Tantangan

- 1) Kesenjangan kemampuan pengajar dalam bahasa Inggris dan teknologi dapat menjadi hambatan awal.
- 2) Biaya pengadaan perangkat dan fasilitas modern cukup tinggi dalam skala institusional.
- 3) Resistensi terhadap perubahan dari budaya tradisional pembelajaran perlu mitigasi melalui manajemen perubahan.

Evaluasi empiris terhadap dampak pendidikan seperti efektivitas perilaku kepolisian, pengurangan pelanggaran internal, dan adaptasi di lapangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa transformasi bukan sekadar formalitas.

Kebijakan pengembangan mutu pendidikan merupakan fondasi strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan mutu tidak hanya bergantung pada kurikulum atau sarana prasarana, tetapi juga pada tata kelola, kualitas pendidik, serta kolaborasi multi-sektor. Reformasi kebijakan pendidikan di Indonesia melalui Merdeka Belajar dan transformasi digital merupakan langkah positif, namun perlu didukung dengan evaluasi berkelanjutan dan pemerataan implementasi di seluruh wilayah.

Transformasi pendidikan di Akpol menuju institusi kepolisian “berwawasan global dan digital” sangat mungkin dilakukan dengan langkah-langkah strategis: revisi kurikulum berbasis kompetensi, penguatan bahasa Inggris, program pertukaran internasional, dan peningkatan fasilitas teknologi (tablet, WiFi,

laboratorium, simulasi). Pelaksanaan secara bertahap—dimulai dari pilot project—dan evaluasi berkala menjadi kunci keberhasilan.

1. Memperkuat tata kelola pendidikan nasional dengan pendekatan berbasis kinerja dan transparansi.
2. Mengoptimalkan sinergi antara dunia pendidikan dan industri agar kurikulum lebih relevan.
3. Memperluas akses dan pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh daerah.
4. Mendorong kolaborasi internasional dan inovasi riset sebagai upaya meningkatkan reputasi akademik dan daya saing global.
5. Lakukan studi empiris (survei, wawancara, uji coba) untuk mengukur dampak setiap komponen program.
6. Prioritaskan pelatihan pengajar sebelum meluncurkan kelas bilingual secara menyeluruh.
7. Cari kemitraan dengan lembaga internasional atau donor teknologi untuk mendukung fasilitas.
8. Publikasikan hasil inisiatif sebagai studi kasus pendidikan kepolisian agar institusi lain bisa belajar

IV. BIBLIOGRAPHY

Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.

Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.

Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.

Sallis, E. (2015). *Total Quality Management in Education*. London: Routledge.

Schwab, K. (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Geneva: World Economic Forum.

Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

UNDP. (2023). *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programme.

World Economic Forum. (2023). *Global Competitiveness Index 2023*. Geneva: WEF.